



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	B-10
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Perlu Kebijakan Kepala Daerah Sikapi Terkait Penerapan SIPD

PADANG - Anggota komisi I DPRD Padang Budi Syahril menyatakan perlu kebijakan kepala daerah dalam menyikapi persoalan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengakibatkan terhalangnya pencairan keuangan di Pemko Padang.

"Sebenarnya ini persoalan terjadi di seluruh Indonesia. Namun perlu kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini. Sebab dengan tidak bermasalahnya sistemnya, banyak pencairan keuangan yang terhalang. Maka kami sudah menanggung sendiri biaya Reses, biaya perjalanan Semiloka," ujar Budi Syahril, anggota Fraksi Gerindra itu, Senin (1/2).

Menurut Budi Syahril, kebijakan pemerintah Kota Padang untuk menyelesaikan persoalan tersebut sangat diperlukan, sebab jika tidak, tentunya akan terhalang seluruh kegiatan di daerah. "Walaupun itu terjadi di seluruh Indonesia, karena stagnasi sistem, apa selesai saja masalah. Persoalannya nyali dari kepala daerah. Apakah ini akan dibiarkan. Kalau sampai enam bulan kedepan masih bermasalah, tentu akan terhalang segala kegiatan," ujar Budi Syahril.

Pihaknya perlu mendorong Pemko bersama pihak terkait melakukan konsensus dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti BPK, kepolisian dan kejaksaan.

"Faktanya, pembayaran gaji Januari dan Februari menggunakan kebijakan dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Budi Syahril. Pihaknya juga akan memanggil pihak Pemko Padang dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan belum adanya keluar uang persediaan (UP). "Kalau peristiwa ini terus berlangsung lama-lama, maka akan terjadi perekonomian mandek di Padang khususnya, karena tidak ada beredar uang di tengah masyarakat," ujar Budi. (105)



BERSAMA - Walikota Mahyeldi bersama Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya dan jajarannya. (humas)